



**Titik Imbau
Warga Tak
Perlu Panik**

YOGYA, TRIBUN - Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Pertamina mulai menimbulkan dampak. Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Yogyakarta mulai kehabisan stok karena tingginya permintaan konsumen namun suplai Pertamina dikurangi.

Pembatasan BBM bersubsidi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat rela mengantri demi membeli BBM. Sebagian lagi memilih membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamina akibat Premium mulai langka.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Pemkot memastikan tidak ada kelangkaan BBM hanya saja ada penyesuaian agar subsidi BBM bisa bertahan hingga akhir tahun nanti.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Titik Sulastri menyebutkan

■ Bersambung ke Hal 14

ANTREAN PANJANG - Antrean panjang pemilik sepeda motor saat akan mengisi bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Selasa (26/8).

TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI GHOZALI

Titik Imbau

Sambungan Hal 13

BBM di Kota Yogyakarta tidak habis. "Kaitannya dengan Premium, tidak habis tetapi cuma dikendalikan," kata Titik di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (26/8).

Terkait kebijakan Pertamina yang membatasi BBM bersubsidi, Titik menyebut belum akan mengeluarkan surat edaran bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Menurut Titik,

dengan kondisi saat ini, PNS seharusnya sudah terketuk hatinya dan beralih ke BBM nonsubsidi.

"PNS yang notabene di masyarakat menjadi teladan seharusnya bisa terketuk sendiri (tidak mengonsumsi BBM subsidi, *Red*)," kata Titik.

Menurut Titik, dengan beralih ke BBM nonsubsidi sama dengan membantu mengurangi subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah.

Sementara itu, Titik menyebut untuk kendaraan dinas Pemkot Yogyakarta, sudah sejak tahun lalu dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Larangan itu juga sudah diatur dalam surat edaran.

Sementara itu, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menyambut baik imbauan Pemkot agar PNS tidak menggunakan BBM subsidi. Koordinator Forpi, Winarta Hadi-

wiyono menyebut imbauan perlu dituangkan dalam surat edaran.

Winarta menambahkan penggunaan Pertamina atau BBM nonsubsidi oleh PNS seharusnya disesuaikan dengan pangkat atau jabatan. Karena tidak semua PNS memiliki kesejahteraan yang sama. "Imbauan itu *kan* tidak wajib, namun hal tersebut bagus karena ikut membantu negara menekan subsidi BBM," kata Winarta. (dnh)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per | Netral | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Forpi | | | |

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005